

Pendidikan Lingkungan bagi Masyarakat Kampung Kota melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Based Development*)

Kata kunci: *Pendidikan lingkungan, Program pemberdayaan masyarakat, Permukiman kampung kota*

Pendahuluan

Permasalahan kualitas lingkungan binaan pada permukiman masyarakat kampung kota hampir di semua kota-kota besar di Indonesia merupakan masalah yang multi dimensi. Seringkali kita dihadapkan pada persoalan yang dilematis antara batas hak yang dimiliki setiap warga kota terutama kaum miskin perkotaan di satu sisi, dan di sisi lain masalah umum perkotaan sebagai satu sistem pengelolaan kota secara terpadu dengan mengedepankan aspek tata ruang perkotaan yang lebih teratur dan terkendali.

Bukan hal yang mudah juga kalau masalah kualitas lingkungan binaan pada satu kota atau kawasan kota dituduhkan pada satu kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah saja, karena kalau ditelusuri lebih jauh, banyak faktor yang saling mendukung atau berperan dalam masalah tersebut. Dari mulai kebijakan pemerintah kota, tekanan arus urbanisasi, ketidakdisiplinan masyarakat, ketidakadilan dan berbagai masalah lain yang harus diurai satu persatu. Untuk kemudian yang lebih penting adalah bagaimana menangani semua masalah tersebut menjadi satu penanganan yang terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek positif maupun negatif.

Pada tulisan ini, penulis mencoba memilah faktor-faktor penyebab tersebut dan lebih spesifik membahas mengenai bagaimana masyarakat kampung kota sebagai subyek dalam lingkungan permukiman mereka memiliki tanggungjawab serta secara mandiri mampu mengelola, mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan binaan mereka.

Beberapa studi menunjukkan bahwa program perbaikan kampung/lingkungan permukiman yang selama ini diterapkan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Karena program-program semacam itu seringkali tidak berkelanjutan (*sustainable*) sehingga sifat gerakan hanya insidental tergantung pada dana proyek yang membiayai.

Tulisan ini didasari bahwa ada cara lain untuk memandang masyarakat miskin bukanlah sebagai sesuatu yang wajar yang harus dibiarkan menerima kemiskinannya sebagai nasib lalu mereka merasa tidak punya kepedulian terhadap lingkungan serta tatanan kota secara umum. Akan tetapi bagaimanapun mereka dapat dibantu untuk dapat lebih menghargai hidup dan lingkungannya dengan kesadaran akan adanya kebutuhan, aspirasi, pendapat dan keinginan untuk mandiri.

Untuk itu, dalam pembahasan peper kecil ini akan diuraikan bagaimana gambaran lingkungan permukiman masyarakat miskin kota yang tinggal di lingkungan permukiman kampung kota. Serta bagaimana memberdayakan sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat sehingga merasa memiliki terhadap

lingkungan permukiman mereka agar mereka mampu secara mandiri membangun lingkungannya dengan konsep “dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka”.

Permukiman Kampung Kota

Permukiman Kampung kota merupakan bagian dari kota, walaupun dengan ciri-ciri tersendiri bila dibandingkan dengan kota lain yang bukan kampung. Sebagai sub-sistem dari kota, kampung dengan sifat komunitasnya mempunyai hakekat:

- Merupakan sistem perantara antara makro sistem masyarakat dengan mikro sistem keluarga
- Terdiri dari penduduk yang dapat diidentifikasi dengan jelas, karena memiliki rasa kebersamaan dan kesadaran sebagai warga suatu kesatuan
- Mengembangkan dan memiliki suatu keteraturan sosial dan spatial, yang ditumbuhkan dari komunitas itu sendiri (disamping ketentuan oleh kota).
- Menunjukkan differensiasi dalam fungsi-fungsi, sehingga bukan merupakan wilayah hunian saja (ada warung, bengkel, salon, dan sebagainya).
- Menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas, yaitu melalui pertukaran sumber daya.
- Menciptakan dan memelihara berbagai bentuk organisasi serta kelembagaan, yang akhirnya memenuhi kebutuhan makrosistem masyarakat dan mikrosistem keluarga.

Sebagai komunitas, kampung kota dapat mempertahankan kelestariannya karena berinteraksi dengan bagian kota lain, berikut fungsi-fungsi spesifik yang terdapat di dalamnya. Atau dengan kata lain kampung kota berfungsi sebagai perantara antara kehidupan kota dengan keluarga yang hidup di kampung, antara lain dengan pertukaran sumber daya antara komunitas dengan masyarakat kota pada umumnya.

Kualitas Lingkungan Binaan sebagai Fenomena Fisik (Arsitektur)

Lingkungan permukiman masyarakat kampung kota sebagai suatu lingkungan binaan secara fisik arsitektural sering digambarkan sebagai suatu lingkungan yang miskin struktur, tidak teratur, dan terkesan kumuh. Hal itu terjadi, karena selain wilayah ini seringkali tidak tersentuh pola kebijakan tata ruang kota, sehingga akses masyarakat terhadap berbagai kepentingannya kurang terakomodasi, serta di sisi lain kesadaran masyarakat karena tingkat pendidikan dan latar belakang masyarakat itu sendiri yang seringkali kurang memahami pentingnya lingkungan permukiman yang berkualitas bagi mereka baik secara fisik maupun sosial.

Ciri-ciri yang lebih sering kita lihat sebagai fenomena arsitektur khususnya arsitektur perkotaan antara lain:

Kondisi lingkungan permukiman yang buruk

Studi pertama yang menggambarkan buruknya lingkungan konsentrasi penduduk Indonesia, dilakukan oleh Westerveld sekitar tahun 1914 (Prisma, 1984)

dimana diungkapkan keadaan kampung pada saat itu: “.....Di situ gubuk-gubuk sangat buruk, tidak layak disebut tempat tinggal manusia.....”

Dalam laporan Tillema pada tahun 1916-1922 (Wiryomartono, 1995), dikatakan bahwa pada saat itu kondisi permukiman masyarakat kota terutama kaum pribumi sangat memprihatinkan:

“...banyak yang perlu dikerjakan di kota Indonesia. Semuanya benar-benar harus diperbaiki, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, penerangan kampung, sanitasi, penataan daerah padat, perbaikan perumahan umumnya, saluran tanah, pembuangan kotoran, pengawasan kebersihan makanan, tidak ada satupun yang layak.....”

Dari kedua laporan tersebut, sudah menggambarkan bahwa masalah buruknya lingkungan permukiman kampung kota sudah ada sejak masa kolonial. Digambarkan bagaimana para penduduk yang miskin harus tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, sanitasi yang buruk serta kondisi lingkungan yang tidak sehat akibat padatnya konsentrasi penduduk di wilayah tersebut.

Sampai saat ini, kota-kota besar di Indonesia mengalami hal yang hampir sama dengan masalah tersebut, pertumbuhan penduduk yang cepat, kebijaksanaan pembangunan yang tidak efektif serta berbagai persoalan fisik dan sosial telah menyebabkan masalah permukiman ini makin tidak terkendali.

Di balik megahnya gedung-gedung tinggi serta pembangunan real estat, lingkungan permukiman masyarakat kampung kota merupakan sisi lain dari wajah kota kita. Padahal sebagian besar penduduk kota adalah mereka yang tinggal di lingkungan permukiman seperti ini.

Aksesibilitas terhadap pelayanan jaringan sanitasi/riool kota

Jaringan umum yang berupa riool kota pada lingkungan permukiman kampung kota tidak pernah terencana dengan baik bahkan sama sekali tidak terakses. Sanitasi lingkungan yang berupa pembuangan limbah rumah tangga dibangun sendiri-sendiri oleh masyarakat dengan sistem jaringan yang seadanya dengan memanfaatkan sungai atau selokan yang ada di sekitar permukiman.

Kondisi perumahan yang padat dengan sanitasi yang buruk, tentu saja kondisi semacam ini secara fisik arsitektural tidak memadai dan tidak memenuhi kesehatan sebagai ruang hidup bagi masyarakat.



Jaringan infrastruktur lingkungan yang tidak terakses jaringan formal kota.

Sumber: Dokumentasi pribadi

Prasarana lingkungan yang tidak memadai

Penguasaan lahan yang tidak profesional di perkotaan oleh kelompok masyarakat tertentu mengakibatkan makin terpinggirkannya lingkungan permukiman masyarakat miskin perkotaan. Sebagai kaum yang terpinggirkan dengan kondisi lahan terbatas, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan fasilitas-fasilitas umum di lingkungan mereka.

Padahal, di suatu lingkungan permukiman selayaknya dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan warga untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti tempat ibadah, gedung serba guna, ruang terbuka dan jalan lingkungan yang terencana dengan baik.

Hal ini sulit diwujudkan karena kepemilikan lahan masyarakat hanya terbatas untuk rumah hunian tanpa ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang publik bagi masyarakat.

Teori Marjinalitas dan Ketergantungan sebagai Fenomena Sosial

Teori Marjinalitas (*Theory of Marginality*) dan Teori Ketergantungan (*Theory of Dependency*), antara lain mengungkapkan bahwa teori Marjinalitas melihat gejala permukiman kumuh sebagai hasil dari perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan yang secara sosial, ekonomi, budaya dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan masyarakat kota.

Teori Marjinalitas secara sosial memiliki ciri-ciri seperti “disorganisasi sosial” (seperti kurang memiliki kohesi sosial, kesepian secara individu) dan isolasi “eksternal” (seperti tidak memanfaatkan fasilitas kelembagaan dan pelayanan kota karena mereka tidak terintegrasi dengan masyarakat kota).

Lebih jauh Clinard (1970) yang dikutip dari Khudori (2002:116-117) mengungkapkan mengenai ciri-ciri yang dominan pada masyarakat miskin kota yaitu “prilaku menyimpang” (*deviant behavior*), “budaya permukiman kumuh” (*culture of the slums*), dan “apatisme dan keterasingan sosial” (*apathy and social isolation*).

“Prilaku menyimpang” seperti kejahatan, kenakalan remaja, pelacuran, kesukaan mabuk, berjudi, minum obat terlarang, meruapak fenomena soaial yang sejak lama digambarkan orang di lingkungan permukiman kampung kota atau permukiman kumuh.

“Budaya permukiman kumuh” merupakan sintesa dari budaya kelas bawah dengan apa yang disebut sebagai budaya kemiskinan. Seringkali di lingkungan masyarakat seperti ini batas kehidupan pribadi (*privacy*) tidak jelas sehingga terjadi keributan antar mereka sendiri, kehidupan semacam ini juga memunculkan banyak sikap-sikap kecurigaan terhadap dunia luar.

Sedangkan “apatisme dan keterasingan sosial” adalah gambaran masyarakat miskin yang dicitrakan sebagai masyarakat yang rendah dengan penampilan fisik dan kesulitan hidupnya. Sehingga anggapan tersebut menjadikan masyarakat kelompok ini merasa terasing secara sosial dan mereka tidak berdaya untuk mengubah kondisi hidupnya.

Teori Ketergantungan melihat gejala permukiman kumuh sebagai akibat dari masuknya ekonomi kapitalis ke pedesaan yang penduduknya padat dan secara struktural diperas oleh perkotaan. Masuknya ekonomi kapitalis ini terutama terwujud dalam program pembangunan pertanian yang dikenal dengan “revolusi hijau”, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pertanian sebanyak-banyaknya.

Namun demikian, hal yang menarik untuk diamati adalah semangat hidup mereka untuk terus bertahan. Walaupun penggusuran tempat tinggal mereka sering dilakukan oleh pemerintah kota, tetapi mereka tetap kembali berusaha dan tinggal di tempat yang sama. Hal ini dapat membentuk kesamaan kemampuan adaptasi privasi dan ruang (Wiryo Martono, 1999), artinya masyarakat kampung kota memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap segala bentuk dan struktur ruang hidup. Hal ini seharusnya menjadi inspirasi bagi para arsitek dan perencana kota untuk mengembangkan program-program pada perancangan lingkungan binaan pada permukiman masyarakat kampung kota dengan bentuk yang bebas sesuai dengan kebutuhan, karena tentu saja sangat sulit untuk menerapkan rasionalisasi modular terhadap ruang dan bentuk dalam kawasan kampung kota. Secara arsitektur, lingkungan binaan terjadi di kawasan kampung kota merupakan suatu kesatuan dalam ketidakaturan.

Bagaimanapun masyarakat kampung kota ini merupakan potensi kota yang tidak bisa begitu saja dihapus dari kehidupan kota, di samping masalah-masalah yang ditimbulkannya. Kehidupan kota akan timpang bila salah satu sub sistem dari kota ini hilang, oleh sebab itu mungkin yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana pola kebijakan dan perencanaan kota dapat melakukan perombakan konsep dunia yang sudah ada dan melakukan konstruksi konsep dunia baru. Konsep itu adalah bagaimana mengintegrasikan kampung kota sebagai sub sistem kota ke dalam kehidupan kota modern yang serba formal dan terorganisir.

“Masyarakat Aktif” sebagai Pendekatan Analisa Sosial

Gambaran masyarakat permukiman kampung kota yang sering diidentikan dengan masyarakat miskin yang telah diuraikan di atas tentu saja tidak semuanya benar dan tidak seharusnya dibiarkan demikian adanya. Kondisi semacam itu akan berbahaya apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang benar. Citra yang mengidentikan ciri-ciri kehidupan mereka bukan mustahil untuk diubah atau setidaknya diperbaiki. Apa yang dilakukan oleh Romo Mangun dan Hassan Fathy misalnya telah memberikan gambaran bahwa mereka sebenarnya dapat diubah pola hidupnya dengan pendekatan-pendekatan yang tidak menjadikan mereka sebagai obyek. Tetapi mengangkat mereka dengan kesadaran bahwa mereka mampu mengangkat harga dirinya dengan memposisikan mereka sendiri sebagai subyek.

Dalam teori sosiologi dikenal dengan analisa sosial untuk penjelajahan isu-isu sosial yaitu suatu perangkat yang akrab dengan metodologi analisa sosiologis yang diharapkan handal menangani isu-isu besar jaman sekarang (Etzioni, 1969) yang dikutip dari M. Poloma (1984: 358).

Model yang diperkenalkan Etzioni (1968) yang dikutip dari M. Poloma (1984:360) untuk menjawab berbagai masalah atau isu-isu sosial masyarakat moderen yaitu:

- Bagaimana seseorang mengendalikan masa depannya?
- Bagaimana masa depan itu agar lebih sedikit ditentukan oleh nasib dan lebih banyak ditentukan tindakan rasional tetapi spontan.
- Bagaimana aktor individual diarahkan?
- Sejauh mana kebenaran kekuatan self-kontrolnya?

Lebih jauh Etzioni mengungkapkan tentang masyarakat aktif sebagai teori proses-proses sosial dan politik dapat dijadikan landasan dalam menganalisa berbagai isu-isu sosial. Masyarakat aktif adalah masyarakat yang menguasai dunia sosial mereka. Dia sangat berbeda dengan masyarakat pasif dimana para anggotanya dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar atau kekuatan aktif lainnya. Orientasi masyarakat aktif memiliki tiga komponen: kesadaran pribadi, pengetahuan para aktor, dan komitmen pada satu atau lebih tujuan yang harus dicapai serta fasilitas sosial untuk mengubah tatanan social (Etzioni, 1968:4).

Menjadikan masyarakat yang mampu mengendalikan diri atau masyarakat aktif tentu saja harus dibarengi dengan pendidikan/pengetahuan karena pengetahuan merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat seperti itu.

Analisa sosial masyarakat aktif merupakan analisa yang cocok untuk direpkan pada masyarakat kampung kota agar mereka mampu membuat perubahan, mengenali dirinya sendiri, menentukan masa depannya sendiri dengan kesadaran.

Program yang dapat mewujudkan masyarakat aktif di lingkungan permukiman masyarakat kampung kota adalah *Community Based Development* . Program semacam ini dapat mendorong masyarakat untuk aktif dan secara mandiri melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki lingkungan permukiman mereka dan menanamkan rasa memiliki terhadap lingkungan sehingga bertanggungjawab baik secara individu maupun kelompok terhadap keberlangsungan lingkungan binaan mereka.

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan analisa diatas, dapatlah disimpulkan sekaligus sebagai jawaban dari analisa tersebut, yaitu berupa bagaimana pelaksanaan dari program mewujudkan masyarakat aktif melalui *Community Based Development* sebagai suatu pendidikan lingkungan bagi masyarakat kampung kota:

Program pembinaan masyarakat

Memandirikan sebuah kelompok masyarakat yang sering dianggap sebagai kelompok marginal bukanlah pekerjaan yang mudah. Apa yang dilakukan oleh Romo Mangunwijaya di Kampung Code Yogyakarta, atau Hassan Fathy di Desa Gourn Baru Mesir, sebagai arsitek humanis mereka mencoba mengangkat harga diri

masyarakat miskin melalui kegiatan pemberdayaan serta menanamkan kemandirian dan kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun lingkungan mereka sendiri.

Program itu sendiri dapat dilakukan dengan cara:

Pendidikan masyarakat sebagai solusi sosial

Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat kampung kota dapat dilakukan pada setiap individu maupun kelompok masyarakat melalui **kegiatan kemasyarakatan** dan **kegiatan pendidikan**. Kegiatan kemasyarakatan meliputi pembentukan organisasi atau kelompok-kelompok kerja di kalangan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kegiatan kemasyarakatan ini dapat diakomodasi segala kepentingan, hak dan kewajiban masyarakat, membangun rasa persaudaraan dan persatuan masyarakat kampung melalui pertemuan, kerja bakti dan kegiatan lain secara terorganisir.

Pendidikan masyarakat juga dapat dilakukan dengan kegiatan pendidikan bagi anak-anak, remaja sampai orang tua. Kegiatan pendidikan ini berguna untuk melatih masyarakat berfikir, bersikap dan bertindak dengan norma-norma kemasyarakatan. Sehingga berbagai konflik diantara mereka dapat terselesaikan oleh mereka sendiri. Dengan pendidikan formal maupun non formal mereka dapat menyadari dirinya sendiri dan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sehingga mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab secara individu maupun sosial terhadap lingkungan mereka.

Pendidikan Lingkungan sebagai solusi arsitektural

Kegiatan pendidikan lingkungan dapat dibagi kedalam tiga bagian: bangunan, pertamanan atau ruang terbuka hijau dan prasarana (sanitasi) lingkungan.

Bangunan disini berupa bangunan perumahan dan bangunan umum. Bangunan perumahan adalah upaya memberikan pembinaan terhadap pemahaman kesehatan rumah, pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan ruang yang nyaman secara fisik maupun psikis bagi mereka. Sedangkan pembinaan bangunan umum adalah sebagai mengoptimalkan fasilitas bangunan umum yang dan dipelihara.

Pertamanan atau ruang terbuka hijau pemahaman tentang pentingnya penghijauan sisa di bantaran sungai misalnya dapat difu Halaman-halaman rumah, jalan lingkungan terbuka hijau yang dapat dinikmati bersama.



Prasarana lingkungan berupa perbaikan jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan sarana-sarana lingkungan yang ada agar dapat bersama-sama dikerjakan melalui kerja bakti agar mereka merasa memiliki dan bertanggungjawab untuk menjaganya.

Kerangka Kerja Partisipasi

Pertama, motif dan inisiatif sebagai permulaan yang harus dipelopori oleh seseorang atau kelompok orang misalnya LSM yang mampu menggerakkan masyarakat.

Kedua, pelaksanaan terpadu, tahap ini masyarakat mulai dipandu untuk melakukan kegiatan-kegiatan memperbaiki lingkungan permukiman mereka dengan inisiatif dari mereka sendiri tetapi kegiatan masih terpadu.

Ketiga adalah mandiri, dalam tahap ini masyarakat dapat tampil sebagai pemrakarsa dan pelaksana program kegiatan secara mandiri sehingga mereka mampu membangun, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan binaan mereka sebagai tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardo, John.W., & Hartman, John J., *Urban Sociology, A Systematic Introduction*, F.E. Peacock Publishers, Inc., 1982.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984.
- Marbun, B.N: *Kota Indonsia Masa Depan: Masalah dan Prospek*. Erlangga, Jakarta, 1994.
- M. Poloma, Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, 1984, Penerbit Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Khudori, Darwis, *Menuju Kampung Pemerdekaan, Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*. Yayasan Pondok Harapan, 2002.
- Wiryomartono, A. Bagoes P., *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Zanden, James W. Vander, *Socilogy The Core*, Mc Graw-Hill Publishing Company, 1990.
- Zahnd, Markus, *Perancangan Kota secara Terpadu, Teori perancangan kota dan penerapannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1999).